



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**RENCANA KERJA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya jumlah kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) 2023 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan serta pendanaannya untuk Tahun 2024 dan maju satu tahun yaitu Tahun 2025

Dengan tersusunnya Renja 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas bagi aparatur untuk penyelenggaraan pelayanan dan peningkatan target kinerja program dan kegiatan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.

Banjarbaru, Juli 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banjarbaru,

H.RIZANA MIRZA, SH. M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 19660828 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat..	39
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.....	40
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	40
3.3. Program dan kegiatan.....	42
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
BAB V : PENUTUP.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unsur Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru wajib menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam setiap tahun yang di tuangkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen operasional tahunan atau jangka pendek.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Rencana Kerja (Renja) dibuat harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru mempunyai arti dan makna strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah Kota Banjarbaru, terutama dalam program-program di lingkup Kesatuan Bangsa, Politik dan organisasi kemasyarakatan di daerah, mengingat :

1. Merupakan dokumen yang secara substansial sebagai implementasi dari visi dan misi serta program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 sesuai arah dan strategi operasional Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru.
2. Merupakan pedoman untuk memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) di tahun 2024.
3. Merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD pada tahun 2026 yang merupakan tahun ke 5 (lima) pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026

Adapun proses penyusunan Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 dimulai dengan :

1. Menyusun rancangan awal Renja SKPD yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur, dimulai dengan pengumpulan bahan dan data untuk pembuatan rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun n (rencana) yang berpedoman dan mengacu pada renstra SKPD dan rancangan awal RKPD.
2. Menyelaraskan Renja melalui forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD dengan melibatkan pemangku kepentingan (*Stakeholders*)
3. Menyusun rancangan akhir Renja SKPD dan dikonsultasikan kepada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan daerah, tahap selanjutnya penetapan rencana, dimana rancangan akhir Renja SKPD yang telah dikonsultasikan dan telah mendapat rekomendasi BAPPEDA selanjutnya ditetapkan oleh kepala SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, DAN RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Banjarbaru;
8. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/268/ KUM/ 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) secara berkesinambungan.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru bertujuan sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran dalam melaksanakan tujuan dan sasaran sesuai capaian kinerja yang telah dirumuskan, serta menjadi alat pengamatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

2. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi maupun indikator-indikator sebagai tolak ukur mengenai keberhasilan maupun kegagalan termasuk hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya
3. Memberikan petunjuk/ acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 agar pelaksanaannya benar-benar terkoordinasi dan teratur sekaligus sebagai instrumen pengendalian.

1.4. SistematikaPenulisan

Penyusunan Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2024 mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistimatika penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPDTahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan AwalRKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Pemangku Kepentingan

Bab III Tugas dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja SKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggara pemerintah, dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, maka akan diperoleh informasi kinerja SKPD, yang dapat menjadi bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran Renja SKPD dengan didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien, sedangkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan Renja SKPD dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah dirumuskan secara tepat dan ditetapkan dalam dokumen Renstra SKPD.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu dan capaian Renstra SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat kajian (Reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun n-2 (tahun 2022) dan perkiraan capaian Tahun n-1 (tahun 2023) yang memuat komponen-komponen sebagai berikut :

- a). Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
- b). Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
- c). Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- d). Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya dan atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
- e). Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.
- f). Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Banjarbaru

Nama PD: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcome) /Kegiatan (output) /SubKegiatan (output)	Target Capaian Program RenstraPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi target	Realisasi Tingkat Capaian Target(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)*
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah / Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	A/ 100%	100%	100%	100%	100%	BB/100%	300	100%
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerjaSKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	100%

8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6	100%
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dn ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	3 Laporan	7	100%
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	100%
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang / Bulan	25 Orang / Bulan	25 Orang / Bulan	25 Orang / Bulan	100%	28 Orang / Bulan	78	28 Orang (100%)
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	1 Laporan (100%)
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100%	10 Laporan	50	10 Laporan (100%)

		Semesteran SKPD								
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	15	5 Laporan (100%)

8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	100%
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6	2 Paket (100%)
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	18	6 Paket (100%)
8.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3	1 Paket (100%)
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36	12 Dokumen (100%)

8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	26 Laporan	86,67%	30 Laporan	86	95.6%
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	5 Unit	17	94.4%
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	100%
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	36	100%
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	100%
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3	100%

8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	36	100%
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	29 Unit	89	96,67%
8.01.02.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Potensi Paham Radikal yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	100%
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kelompok Masyarakat /Organisasi Kemasyarakatan yang Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	100%
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3	100%

8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah sosialisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela NegaraJumlah sosialisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	6711 Orang	6711 Orang	6711 Orang	6711 orang	100%	6711orang	20.133	100%
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah koordinasi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Revolusi mental	190 Orang	190 orang	190 orang	190 orang	100%	190 orang	570	100%
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	96 Laporan	96 Laporan	96 Laporan	96 Laporan	100%	96 Laporan		100%
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	100%

8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	100%
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	120 orang	120 orang	120 orang	71 orang	59%	120 orang	311	86.3%
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	109 orang	120 orang	120 orang	104 orang	87%	120 orang	344	96 %

	Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 laporan	6	100%
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Aktif	100	85,16%	85%	92%	108,2%	90%	-	-
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Pemberdayaan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengelolaan Keormasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	100%
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	100%	300 orang	900	100%

		Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah monitoring dan evaluasi keormasan	4 Laporan	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12	100%
8.01.05.2.01	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pasilitasi / Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	100%
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Instansi yang bekerjasama dalam ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (FKUB dan P4GN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	100%
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	590 Orang	-	-	-	-	590 orang	590	100%

8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	425 Orang	425 Orang	425 Orang	425 Orang	100%	425 Orang	1.275	100%
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	100%	34 Laporan	102	100%
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	100%

8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pontensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam yang diverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	100%
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100%	50 orang	150	100%
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah koordinasi kewaspadaan dini Pemerintah Kota Banjarbaru, Penanganan Konflik Sosial dan FKDM	655 orang	655 orang	655 orang	655 orang	100%	655 orang	1.965	100%

8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	100%	29 Laporan	87	100%
-----------------	---	---	------------	------------	------------	------------	------	------------	----	------

Dari evaluasi hasil pelaksanaan renja yang disajikan pada tabel 2.1 diatas dapat didefinisikan bahwa untuk menilai realisasi/capaian program/kegiatan baik yang tidak memenuhi target kinerja, yang telah memenuhi target kinerja maupun yang melebihi target kinerja hasil/keluaran diukur berdasarkan capaian 5 (lima) indikator utama yg dilaksanakan dengan 5 (lima) program utama sesuai dengan Meningkatkan iklim kehidupan masyarakat yang aman nyaman dan kondusif yaitu :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Meningkatnya penguatan dan pemahaman Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Target kinerja renja 100% realisasi 100% capaian program telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran dan termasuk dalam katagori baik.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan

Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Meningkatnya partisipasi peran partai politik dalam pendidikan politik, Pengembangan Etika Serta Budaya Politik masyarakat. Target kinerja renja 100%realisasi 100% target kinerja hasil/ keluaran dan termasuk dalam kategori baik.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,Target kinerja renja capaian 95% realisasi 95% capaian program telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran dan termasuk dalam katagori baik.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Target kinerja renja capaian 100% realisasi 100% capaian program telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran dan termasuk dalam katagori baik.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Meningkatnya Kewaspadaan, Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial. Target kinerja renja capaian 100% realisasi 100% capaian program telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran dan termasuk dalam katagori baik.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis capaian kinerja SKPD berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD yang diukur dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan capaian kinerjanya sangat berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru, keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan terlihat dengan meningkatnya kualitas :

1. Penguatan dan pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Partisipasi peran partai politik dalam pendidikan politik, Pengembangan Etika serta budaya politik masyarakat
3. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
5. Meningkatnya kewaspadaan, kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial

Analisis capaian kinerja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banjarbaru

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Restra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4			5	6	7	8					9	10	11	12	13
1	Persentase potensi paham radikal yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
2	Persentase peran partai politik dalam Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
3	Persentase ormas yang aktif			80%	85%	90%	95%	100%	100%	85,16 %	92 %	100%						

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Restra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4			5	6	7	8					9	10	11	12	13
.4	Persentase fasilitasi / pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
5	Persentase potensi konflik Ipolek sosbud Hankam yang ditangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
6	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

Faktor penyebab tercapainya/terpenuhinya target kinerja program kegiatan sebagai berikut :

1. koordinasi dan konsultasi internal organisasi dan eksternal organisasi baik bersifat vertikal, horizontal, fungsional maupun instansional.
2. Kerjasama yang relatif baik dengan SKPD dan instansi terkait dengan pelaksanaan masing-masing kegiatan terutama dengan tim-tim terpadu.
3. Pemahaman dan kepedulian dari forum-forum kerjasama sebagai mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Banjarbaru dalam berpartisipasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan lingkup fungsi dan peranannya masing-masing, antara lain :
 - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) terkait dengan konflik sosial secara umum
 - Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) terkait dengan konflik yang berlatar belakang etnis (kesukuan)
 - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terkait dengan konflik yang bernuansa agama

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal-hal kritis terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang serta isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan penting/strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Selain tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol dalam bidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Banjarbaru adapun kekuatan dan kesulitan yang muncul dari dalam (internal) dan luar (eksternal) Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru itu sendiri dengan bentuk peluang dan ancaman. Akan dipaparkan permasalahan utama yang muncul dari *Internal* dan *Eksternal* Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru ke dalam bentuk *SWOT (Strength, Weakness, Oportunity, Threat)*

1. Lingkungan internal, merupakan faktor yang sebagian besar terdapat dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru serta dapat dibedakan menjadi kekuatan dan kelemahan.
 - a. Kekuatan (Strength)
 - ✓ Kerja sama antar SDM yang baik
 - ✓ Komunikasi yang baik antar SDM di Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru serta dengan unsur terkait yang terus dijaga
 - ✓ SDM yang cukup berkualitas
 - ✓ Adanya dukungan pimpinan dan semangat kerja.
 - b. Kelemahan (Weakness)
 - ✓ Kurang lengkapnya sarana dan prasarana kantor
 - ✓ Terbatasnya kemampuan sumber pendanaan
 - ✓ Terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki.
2. Lingkungan eksternal, merupakan faktor yang berada di luar lingkungan Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru serta dapat dibedakan menjadi peluang dan ancaman.
 - a. Peluang (Opportunity)
 - ✓ Kondisi politik Kota Banjarbaru yang stabil
 - ✓ Ketentraman berkesatuan bangsa yang terus dijaga oleh masyarakat
 - ✓ Reformasi di bidang politik dan administrasi publik
 - ✓ Masyarakat Kota Banjarbaru terus menggunakan jalur yang benar dalam penyelesaian konflik sosial
 - ✓ Masyarakat Kota Banjarbaru terus menempuh jalur yang benar dalam menjalankan hak-hak demokrasi
 - ✓ Masyarakat Kota Banjarbaru semakin sadar akan hak-hak politik.
 - b. Ancaman (Threat)
 - ✓ Sebagian masyarakat Kota Banjarbaru masih menempuh jalur yang berlawanan dalam menjalankan hak-hak demokrasi
 - ✓ Masih ada masyarakat di Kota Banjarbaru yang menggunakan bentuk-bentuk kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai SKPD, dengan arahan Kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Rumusan rencana program dan kegiatan yang diusulkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru pada rancangan awal RKPD tahun 2024 seperti disajikan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KOTA BANJARBARU

NAMA SKPD :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Banjarbaru	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	BB 100%	3.156.217.626	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Banjarbaru	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	BB 100%	3.582.001.290	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banjarbaru	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	38.234.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banjarbaru	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	35.500.000	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	16.386.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan SKPD yang	2 dokumen	15.500.000	

								tersusun sesuai ketentuan			
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	21.484.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 dokumen	20.000.000	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banjarbaru	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	3.117.982.926	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Banjarbaru	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	3.045.926.390	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banjarbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/ Bulan	3.048.296.934	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Banjarbaru	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	25 orang	2.988.526.406	
8.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.202.000	Penyediaan Makan dan Minuman	Banjarbaru	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	1 laporan	5.000.000	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	20 laporan	64.483.992	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	18 laporan	52.400.000	

			Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD					Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD			
8.01.01.2.03	Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Banjarbaru	Persentase BMD yang teridentifikasi dan terverifikasi	0%	0	Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Banjarbaru	Persentase BMD yang teridentifikasi dan terverifikasi	100%	22.700.000	
8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	22.700.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banjarbaru	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	326.660.222	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banjarbaru	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	250.692.000	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banjarbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.785.840	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banjarbaru	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	3 Paket	4.692.000	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banjarbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	110.278.238	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banjarbaru	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia	6 Paket	82.000.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banjarbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.126.200	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banjarbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.000.000	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5.306.040	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	4 Dokumen	2.000.000	

								Disediakan			
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	190.163.904	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	50 laporan	150.000.000	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banjarbaru	cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	70.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banjarbaru	cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	49.934.000	
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banjarbaru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banjarbaru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Banjarbaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Buah	6.000.000	Pengadaan Mebel	Banjarbaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	64.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	49.934.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	130.135.680	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	43.500.200	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	1 Jenis	110.160.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	0	

			Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 orang	19.975.680	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.500.000	
8.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	231.009.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Banjarbaru	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	133.748.700	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	45.777.6000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	38.067.050	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	83.232.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banjarbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	76.181.650	
8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Banjarbaru	Jumlah Mebel yang dipelihara	30 unit	10.200.000	Pemeliharaan Mebel	Banjarbaru	Jumlah Mebel yang dipelihara	0 unit	0	

8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	71.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	29 Unit	19.500.000	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Paket	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Banjarbaru	Persentase potensi paham radikal yang diselesaikan	100%	797.013.925	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Banjarbaru	persentase potensi paham radikal yang diselesaikan	100%	1.922.589.450	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Banjarbaru	Persentase Kelompok Masyarakat /Organisasi Kemasyarakatan yang Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	797.013.925	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Banjarbaru	persentase kelompok masyarakat / organisasi kemasyarakatan yang memahami ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	1.922.589.450	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Banjarbaru	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 dokumen	46.818.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Banjarbaru	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 dokumen	35.000.000	

								dan Sejarah Kebangsaan			
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Banjarbaru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3001 Orang	301.783.525	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Banjarbaru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6711 Orang	1.587.354.100	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Banjarbaru	Jumlah koordinasi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Revolusi mental	12 kali	354.776.400	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Banjarbaru	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan	190 Orang	219.375.000	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Banjarbaru	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	60 kali	93.636.000	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Banjarbaru	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan	40 Laporan	80.860.350	

	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Banjarbaru	Persentase Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	2.072.988.304	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Banjarbaru	persentase peran partai politik dalam Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	19.684.506.150	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Banjarbaru	Persentase Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	2.072.988.304	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Banjarbaru	persentase peran partai politik yang melaksanakan Pendidikan Politik dengan anggaran melebihi 50% dari bantuan hibah yang diberikan pemerintah	100%	19.684.506.150	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Banjarbaru	Jumlah sosialisasi pendidikan politik	7 kali	280.908.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Banjarbaru	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di	150 Orang	17.973.889.200	

	Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Partai Politik yang mendapatkan bantuan hibah	9 parpol	1,605,058,000	Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banjarbaru	Jumlah koordinasi pendidikan politik	8 Kali	108.742.608	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banjarbaru	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	113 orang	75.000.000	

8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banjarbaru	Jumlah Monitoring dan evaluasi situasi politik	6 kali	78.279.696	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banjarbaru	Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	1.635.616.950	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Banjarbaru	Persentase ormas yang aktif	90%	178.615.872	PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Banjarbaru	Persentase ormas yang aktif	95%	115.000.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Banjarbaru	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengelolaan keormasan	100%	178.615.872	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Banjarbaru	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengelolaan keormasan	95%	115.000.000	

8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Banjarbaru	Jumlah sosialisasi keormasan	3 kali	93.636.000	Pelaksanaan kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Banjarbaru	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	60.000.000	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Banjarbaru	Jumlah monitoring dan evaluasi keormasan	40 kali	84.979.872	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Banjarbaru	Jumlah laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	55.000.000	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Banjarbaru	Persentase fasilitasi / pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100%	450.576.432	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Banjarbaru	Persentase fasilitasi / pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100%	463.596.300	

8.01.05.2.02	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Banjarbaru	Jumlah Instansi yang bekerjasama bidang ekonomi, sosial dan budaya	100%	450.576.432	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Banjarbaru	Jumlah Instansi yang bekerjasama bidang ekonomi, sosial dan budaya	100%	463.596.300	
8.01.05.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banjarbaru	Jumlah sosialisasi P4GN	4 kali	93.636.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banjarbaru	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	590 orang	60.000.000	
8.01.05.2.02.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banjarbaru	Jumlah koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	15 kali	356.940.432	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banjarbaru	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	425 orang	383.596.300	

			Daerah					Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
8.01.05.2.02.05	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banjarbaru	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	34 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banjarbaru	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	34 Laporan	20.000.000	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Banjarbaru	Persentase potensi konflik Ipolek sosbud Hankam yang ditangani	100%	1.061.208.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Banjarbaru	Persentase potensi konflik Ipolek sosbud Hankam yang ditangani	100%	692.445.500	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Banjarbaru	Presentase pontensi konflik Ipolek sosbud Hankam yang diverifikasi	100%	1.061.208.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Banjarbaru	Presentase pontensi konflik Ipolek sosbud Hankam yang diverifikasi	100%	692.445.500	

8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Banjarbaru	Jumlah sosialisasi/ bimtek kewaspadaan dini	1 kali	36.414.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Banjarbaru	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 orang	30.000.000	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Banjarbaru	Jumlah koordinasi kewaspadaan dini	18 kali	957.168.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Banjarbaru	Jumlah orang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas	655 orang	611.245.500	

								Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Banjarbaru	Jumlah monitoring dan evaluasi kewaspadaan dini	24 kali	67.626.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Banjarbaru	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 laporan	51.200.000	
					8.474.425.661						26.460.138.690

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi SKPD terkait. Dalam hal ini tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang terdapat dalam anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Demikian pula dengan Renja SKPD Provinsi yang merupakan dokumen perencanaan SKPD dan pemerintah provinsi untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai pada Renstra provinsi dan bersifat indikatif.

Hubungan antara Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru dengan dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga maupun Rencana Kerja SKPD Provinsi terkait, harus selaras dan saling mendukung. Sehingga rencana pembangunan di daerah dapat saling menunjang dengan rencana pembangunan di daerah provinsi maupun di kementerian/ lembaga atau rencana pembangunan pemerintah pusat.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2023 ditetapkan untuk mewujudkan visi organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru yaitu “Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Dalam Tatahan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis dan Ketahanan Masyarakat Yang Maju, Agamis Dan Sejahtera”. Tujuan dan sasaran Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 ditetapkan dalam rangka “Meningkatkan Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat Berlandaskan Budaya Lokal”.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran yang di arahkan pada peningkatan “Manajemen Pemerintahan / Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan yang terlaksana secara terintegrasi akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat”.

Sedangkan untuk mengukur dan menilai setiap capaian sasaran, ditetapkan Indikator kinerja Program/ Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
Meningkatnya keamanan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat berlandaskan budaya lokal	Meningkatnya penguatan dan pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi paham radikal yang diselesaikan	100%
	Meningkatnya partisipasi peran partai politik dalam pendidikan politik, Pengembangan Etika Serta Budaya Politik masyarakat	Persentase peran partai politik dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif	95%
	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase fasilitasi / pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%
	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik Ipolek sosbud Hankam yang ditangani	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru menetapkan sejumlah Program yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan. Program-Program tersebut adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Adapun Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dirumuskan sejumlah sub kegiatan sebagai pengerahan sejumlah sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program. Sub kegiatan pada setiap Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- b. koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- c. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- e. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD
- f. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD
- g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- h. Penyediaan bahan logistik kantor
- i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- k. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- l. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- m. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- n. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- o. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- p. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

2) Sub Kegiatan Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

3) Sub Kegiatan Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
- b. Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah

- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah

4) Sub Kegiatan pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
- b. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah

5) Sub Kegiatan Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

- a. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.
- b. Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

6) Sub Kegiatan Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah

- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru

kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
8					Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik							
8	0	1										
8	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Banjarbaru	BB	3.582.001.290	APBD	BB	3.756.698.078.
						Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Banjarbaru	100%	35.500.000	APBD	100%	39.050.000
8	0	0	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	Banjarbaru	100%	35.500.000	APBD	100%	39.050.000
8	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banjarbaru	2 Dokumen	15.500.000	APBD	2 Dokumen	17.050.000
8	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarbaru	2 Laporan	20.000.000	APBD	2 Laporan	22.000.000
8	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Banjarbaru	100%	3.045.926.390	APBD	100%	3.169.762.873
8	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Banjarbaru	25 Orang/bulan	2.988.526.390	APBD	25 Orang/bulan	3.109.262.873

8	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banjarbaru	1 Laporan	5.000.000	APBD		1 Laporan	5.500.000
8	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Banjarbaru	10 Laporan	52.400.000	APBD		10 Laporan	55.000.000
8	0	0	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang teridentifikasi dan terverifikasi	Banjarbaru	100%	22.700.000	APBD		100%	24.970.000
8	0	0	2.	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Banjarbaru	5 Laporan	22.700.000	APBD		5 Laporan	24.970.000
8	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Banjarbaru	100%	250.692.000	APBD		100%	275.481.557
8	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Banjarbaru	2 Paket	4,692,000	APBD		3 Paket	4.881.557
8	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Banjarbaru	6 Paket	82.000.000	APBD		6 Paket	90.200.000
8	0	0	2.	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Banjarbaru	1 Paket	12.000.000	APBD		1 Paket	13.200.000
8	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Banjarbaru	12 Dokumen	2.000.000	APBD		12 Dokumen	2.200.000
8	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru	30 Laporan	150.000.000	APBD		30 Laporan	165.000.000
8	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Banjarbaru	100%	49.934.000	APBD		100%	55.000.000
8	0	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Banjarbaru	-	-	APBD		-	-
8	0	0	2.	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Banjarbaru	-	-	APBD		-	-

8	0	1	1	0	7	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Banjarbaru	6 Unit	49.934.000	APBD		6 Unit	55.000.000		
8	0	1	1	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah daerah yang difasilitasi	Banjarbaru	100%	43.500.200	APBD		100%	45.211.848		
8	0	1	1	0	8	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Banjarbaru	-	-	APBD		-	-		
8	0	1	1	0	8	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Banjarbaru	-	-	APBD		-	-		
8	0	1	1	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Banjarbaru	100%	133.748.700	APBD		100%	147.221.800		
8	0	1	1	2	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Banjarbaru	1 Unit	38.067.050	APBD		1 Unit	41.883.600		
8	0	1	1	0	9	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Banjarbaru	12 Unit	76.181.650	APBD		12 Unit	83.811.200		
8	0	1	1	2	0	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Banjarbaru	-	-	APBD		-	-		
8	0	1	1	2	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Banjarbaru	29 Unit	19.500.000	APBD		29 Unit	21.527.000		
8	0	1	1	2	0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banjarbaru	-	-	APBD		-	-		
kode							Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Maju Tahun 2025			
									Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1							2		3		4	5	6	7	8	9	10
8	0	1	2				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Potensi Paham Radikal yang diselesaikan	Banjarbaru	100%	1.922.589.450	APBD		100%	2.110.888.450		

8	0	0	2.		Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kelompok Masyarakat /Organisasi Kemasyarakatan yang Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Banjarbaru	100%	1.922.589.450			100%	2.110.888.450		
8	0	0	2.	0	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Banjarbaru	3 Dokumen	35.000.000	APBD		3 Dokumen	38.500.000		
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Banjarbaru	6711 Orang	1.587.354.100	APBD		6711 Orang	1.746.089.510		
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Banjarbaru	190 Orang	219.375.000	APBD		190 Orang	237.352.500		
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Banjarbaru	40 Laporan	80.860.350	APBD		40 Laporan	88.946.440		
kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Maju Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1					2		3		4	5	6	7	8	9	10
8	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERT A BUDAYA POLITIK	Persentase Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Banjarbaru	100%	19.684.506.150	APBD		100%	1.979.358.975		
8	0	0	2.		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Persentase Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Banjarbaru	100%	19.684.506.150	APBD		100%	1.979.358.975		

					Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banjarbaru	150 Orang	17.973.889.200	APBD		150 Orang	99.000.000
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banjarbaru	113 Orang	75.000.000	APBD		113 Orang	82.500.000
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banjarbaru	1 Laporan	1.635.616.950	APBD		1 Laporan	1.797.858.975
8	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Aktif	Banjarbaru	95%	115.000.000	APBD		95%	126.500.000
8	0	0	2.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengelolaan Keormasan	Banjarbaru	95%	115.000.000	APBD		95%	126.500.000
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Banjarbaru	300 orang	60.000.000	APBD		300 orang	66.000.000
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Banjarbaru	4 Laporan	55.000.000	APBD		4 Laporan	60.500.000

kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
8005	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				Persentase Pasilitasi / Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Banjarbaru	100%	463.596.300	APBD		100%	507.315.930
80051	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				Persentase Instansi yang bekerjasama dalam ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (FKUB dan P4GN)	Banjarbaru	100%	463.596.300	APBD		100%	507.315.930
800513	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banjarbaru	590 Orang	60.000.000	APBD		590 Orang	66.000.000
800514	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banjarbaru	425 Orang	383.596.300	APBD		425 orang	419.315.930
800515	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banjarbaru	34 Laporan	20.000.000	APBD		34 Laporan	22.000.000
kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Maju Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
8006	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				Persentase Potensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam yang ditangani	Banjarbaru	100%	692.445.500	APBD		100%	760.370.056

8	0	0	2.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pontensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam yang diverifikasi	Banjarbaru	100%	692.445.500	APBD		100%	760.370.056
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Banjarbaru	50 Orang	30.000.000	APBD		50 Orang	33.000.000
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Banjarbaru	655 Orang	611.245.500	APBD		655 Orang	672.370.056
8	0	0	2.	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Banjarbaru	4 Laporan	51.200.000	APBD		4 Laporan	55.000.000
JUMLAH									26.460.138.690				9.241.131.489

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 berjumlah 6 program, 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan Anggaran Belanja sebesar **Rp 26.460.138.690,-** yang bersumber dari APBD, dapat dilihat pada tabel berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	BB/100%	3.582.001.290
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	35.500.000
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	15.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	20.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	3.045.926.390
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	25 Orang	2.988.526.390
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan	1 Laporan	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	10 Laporan	52.400.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang teridentifikasi dan terverifikasi	100%	22.700.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	22.700.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	250.692.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	2 Paket	4.692.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia	6 Paket	82.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia Jumlah barang cetakan yang tersedia	1 Paket	12.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia	12 Dokumen	2.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	30 Laporan	150.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	49.934.000
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 Unit	49.934.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	43.500.200
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor lainnya	12 Laporan	43.500.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	133.748.700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	1 Unit	38.067.050
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	76.181.650
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	29 Unit	19.500.000
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Potensi Paham Radikal yang diselesaikan	100%	1.922.589.450
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kelompok Masyarakat /Organisasi Kemasyarakatan yang Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	1.922.589.450
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Dokumen	35.000.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6711 Orang	1.587.354.100
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	190 Orang	219.375.000

dan Sejarah Kebangsaan	Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40 Laporan	80.860.350
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	19.684.506.150
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peran Partai Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik dengan Anggaran Melebihi 50% dari Bantuan Hibah yang diberikan Pemerintah	100%	19.684.506.150
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	150 orang	17.973.889.200
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	113 Orang	75.000.000
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	1 Laporan	1.635.616.950

Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi politik di daerah		
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Aktif	95%	115.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengelolaan Keormasan	95%	115.000.000
Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	60.000.000
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	55.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pasilitasi / Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	463.596.300
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Instansi yang bekerjasama dalam ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (FKUB dan P4GN)	100%	463.596.300
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	590 Orang	60.000.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	425 Orang	383.596.300

	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	34 Laporan	20.000.000
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam yang ditangani	100%	692.445.500
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pontensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam yang diverifikasi	100%	692.445.500
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	30.000.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	655 Orang	611.245.500
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	4 Laporan	51.200.000

RENCANA KERJA | 2024

	Penanganan Konflik di Daerah		
			26.460.138.690

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru tahun 2024 merupakan dokumen penting untuk memberikan arah perencanaan pembangunan tahunan guna mendukung pencapaian visi dan misi Renstra SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru serta visi dan misi jangka menengah Pemerintah Daerah. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 sebagai pedoman resmi bagi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 dan sebagai acuan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.

Dalam Rencana Kerja ini berisikan rencana penganggaran pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, sesuai usulan yang telah disampaikan dan apabila tidak tersedia anggaran yang cukup maka beberapa kegiatan akan disesuaikan anggaran yang tersedia.

Rencana Kerja (Renja) disusun dan ditetapkan untuk mensinergikan rencana pembangunan tahunan SKPD dengan rencana pembangunan tahunan daerah, sehingga menghasilkan perencanaan tahunan yang bermutu, akuntabel, dan tepat waktu.

Banjarbaru, Juli 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banjarbaru,



H.RIZANA MIRZA, SH, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19660828 199303 1 007